

Model *Collaborative Community-Based Tourism* dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Ohoi Soinrat Kabupaten Maluku Tenggara)

Jhosephin Virani Triani Rahail^{1*}, Ana Maria Rosalia Janwarin¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : jhosephinviranirahail@gmail.com

Article History:

Received : 27-07-2026

Accepted : 30-08-2026

Keywords: Collaborative Governance; Community-Based Tourism; Desa Wisata; Kearifan Lokal; Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model *Collaborative Community-Based Tourism (CBT)* dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat Kabupaten Maluku Tenggara dengan fokus pada kolaborasi pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata didukung oleh potensi alam, budaya, modal sosial masyarakat, serta peran Pokdarwis dan pemerintah dalam pembangunan destinasi. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan tata kelola wisata yang belum optimal. Penelitian ini menawarkan model *Collaborative Community-Based Tourism* berbasis kearifan lokal sebagai strategi pengembangan desa wisata berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya lokal.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan identitas sosial dan budaya suatu wilayah. Dalam paradigma pembangunan modern, pengembangan pariwisata tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan keuntungan ekonomi, tetapi telah bergeser menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable tourism development*) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah *Community-Based Tourism (CBT)*, yaitu konsep pengembangan pariwisata yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang memiliki peran dalam mengelola dan memanfaatkan potensi wilayahnya.

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan berbasis potensi lokal. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator,

dan penggerak kolaborasi antara berbagai aktor pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep *Good Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Menurut paradigma *good governance*, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan kolaboratif, transparan, partisipatif, dan akuntabel antaraktor.

Dalam konteks pengembangan desa wisata, teori *Collaborative Governance* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah, masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya bekerja sama dalam mengelola sumber daya wisata. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung dalam suatu forum bersama untuk mencapai tujuan bersama. Perspektif ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak dapat bekerja secara sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat dan aktor lainnya agar pengembangan wisata dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam kajian Ilmu Pemerintahan Desa, pembangunan desa merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi desa, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi lokal seperti pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata menjadi salah satu bentuk implementasi fungsi pemerintahan desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Secara normatif, pengembangan desa wisata memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan memperhatikan hak asal usul, kepentingan masyarakat, serta potensi lokal (Republik Indonesia, 2014, 2024). Dalam sektor pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta pelestarian alam dan budaya. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menekankan aspek pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya, serta keberlanjutan lingkungan. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Maluku yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang sangat besar. Karakteristik wilayah kepulauan dengan kekayaan pantai, laut, pulau-pulau kecil, hutan, serta budaya masyarakat Kei menjadi modal strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Salah satu wilayah yang memiliki potensi tersebut adalah Ohoi Soinrat, yang memiliki berbagai sumber

daya wisata seperti panorama pantai, air terjun, kawasan hutan, sungai, serta tradisi adat masyarakat yang masih terpelihara. Potensi tersebut menjadikan Ohoi Soinrat memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat telah memperoleh dukungan dari pemerintah melalui pembangunan infrastruktur dasar wisata serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Selain itu, masyarakat lokal juga menunjukkan keterlibatan melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan lingkungan, serta pelestarian budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan wisata yang mencerminkan prinsip kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat masih menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan destinasi belum berjalan secara optimal karena beberapa objek wisata belum memiliki legalitas dan pengelolaan administratif yang jelas sehingga sistem pelayanan dan retribusi wisata belum dapat diterapkan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya kemampuan manajemen wisata masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor primer menjadi hambatan dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan potensi alam dan budaya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan lokal, koordinasi antaraktor, dan tingkat partisipasi masyarakat. Dalam perspektif pemerintahan, pembangunan desa wisata membutuhkan pola hubungan yang sinergis antara pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, masyarakat sebagai pemilik sumber daya lokal, serta kelompok masyarakat dan sektor swasta sebagai mitra pembangunan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh faktor partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan dukungan pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat atau pengelolaan destinasi wisata secara umum. Kajian yang mengintegrasikan perspektif Ilmu Pemerintahan, khususnya konsep Collaborative Governance, Good Governance, dan Community-Based Tourism dalam konteks desa wisata berbasis kearifan lokal masyarakat kepulauan Indonesia Timur masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model *Collaborative Community-Based Tourism Berbasis Kearifan Lokal* dalam perspektif pemerintahan, yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu (1) kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan wisata, (2) kolaborasi antaraktor pembangunan melalui pendekatan *collaborative governance*, dan (3) pemberdayaan masyarakat berbasis nilai budaya lokal masyarakat Kei. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait tata kelola pembangunan desa berbasis potensi lokal, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Model *Collaborative Community-Based Tourism* dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat Kabupaten Maluku Tenggara, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat

pengembangannya, serta merumuskan model tata kelola desa wisata berbasis kearifan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai proses pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat, khususnya terkait partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, peran pemerintah, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan dan pengembangan desa wisata dalam konteks sosial, kelembagaan, dan budaya masyarakat Ohoi Soinrat, Kabupaten Maluku Tenggara.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Ohoi Soinrat, Kabupaten Maluku Tenggara. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena Ohoi Soinrat memiliki potensi wisata alam dan budaya, serta telah memperoleh dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Potensi tersebut meliputi pantai, air terjun, sungai, kawasan hutan, dan tradisi adat masyarakat yang masih dipelihara. Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu: (1) potensi wisata dan kearifan lokal; (2) partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata; (3) kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya; serta (4) faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan tata kelola desa wisata yang berkelanjutan.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat. Informan terdiri atas unsur pemerintah ohoi, pengurus dan anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat atau tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengembangan wisata. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan wisata. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi dan prinsip kecukupan data. Proses pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang relatif berulang dan tidak ditemukan informasi substantif baru yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengembangan desa wisata, bentuk partisipasi masyarakat, pola hubungan dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, peran pemerintah dan Pokdarwis, pemanfaatan kearifan lokal, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi wisata. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan sekaligus memperoleh keleluasaan untuk menggali informasi yang berkembang selama proses wawancara.

Kedua, observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi destinasi wisata, aktivitas masyarakat, kegiatan Pokdarwis, pemeliharaan lingkungan, fasilitas pendukung wisata, serta bentuk interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi. Observasi digunakan untuk melengkapi dan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen pemerintahan, dokumentasi kegiatan, foto kondisi destinasi, data kelembagaan Pokdarwis, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan antartema, dan keterkaitan antaraktor dalam pengembangan desa wisata.

Tahap selanjutnya adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan pola dan hubungan yang ditemukan dengan mengaitkannya pada konsep *Collaborative Governance* dan *Community-Based Tourism*. Analisis diarahkan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, Pokdarwis, dan pemangku kepentingan lainnya berlangsung, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan wisata, serta bagaimana kearifan lokal diintegrasikan dalam pengelolaan destinasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan Model *Collaborative Community-Based Tourism* berbasis kearifan lokal di Ohoi Soinrat.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemerintah ohoi, Pokdarwis, tokoh masyarakat atau tokoh adat, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Proses triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai praktik kolaborasi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, serta faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat sebagai dasar perumusan model *Collaborative Community-Based Tourism* yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Potensi Desa Wisata Ohoi Soinrat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ohoi Soinrat memiliki potensi wisata alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata. Potensi tersebut meliputi pantai, air terjun, sungai, kawasan hutan, serta tradisi adat yang masih terjaga. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam, pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga

pengelola wisata. Potensi tersebut menunjukkan bahwa Ohoi Soinrat memiliki modal yang memadai untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Menurut konsep *Community-Based Tourism* (CBT), keberhasilan pengembangan desa wisata ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan sehingga manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat. Masyarakat terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan kawasan wisata, pembangunan fasilitas, menjaga kebersihan lingkungan, serta berpartisipasi dalam Pokdarwis. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap pengembangan desa wisata. Temuan ini sejalan dengan teori *Community-Based Tourism* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, nilai gotong royong yang masih kuat mencerminkan modal sosial masyarakat Kei yang menjadi kekuatan dalam mendukung pembangunan desa secara partisipatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kekuatan hubungan sosial dan budaya masyarakat.

3. Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah desa, masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah pusat melalui dukungan pembangunan infrastruktur wisata. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya pembagian peran dalam proses pengembangan desa wisata, mulai dari pembangunan fasilitas hingga pengelolaan kawasan wisata. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan desa wisata. Namun demikian, koordinasi yang lebih intensif masih diperlukan agar pengelolaan desa wisata dapat berjalan secara optimal.

4. Kendala Pengembangan Desa Wisata

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya tata kelola destinasi wisata karena objek wisata belum diresmikan secara administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penguatan kelembagaan Pokdarwis, promosi wisata berbasis digital, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan legalitas pengelolaan destinasi. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

5. Model *Collaborative Community-Based Tourism*

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat dapat dijelaskan melalui Model *Collaborative Community-Based Tourism*. Model ini mengintegrasikan potensi wisata, partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan kearifan lokal sebagai dasar pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Model tersebut menggambarkan bahwa potensi wisata yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah desa, Pokdarwis, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat akan menghasilkan tata kelola desa wisata yang lebih efektif. Selanjutnya, tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha ekonomi lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembahasan

1. Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ohoi Soinrat memiliki modal dasar yang cukup kuat untuk dikembangkan sebagai desa wisata, baik dalam bentuk potensi alam maupun budaya. Potensi tersebut meliputi pantai, air terjun, sungai, kawasan hutan, serta tradisi adat masyarakat yang masih dipelihara. Keberadaan potensi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Ohoi Soinrat tidak semata-mata bergantung pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mempertahankan sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.

Dalam perspektif *Community-Based Tourism (CBT)*, keberadaan sumber daya lokal perlu diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Suansri (2003) menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas, karena pariwisata seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Pandangan tersebut sejalan dengan Goodwin dan Santilli (2009) yang menekankan bahwa keberhasilan CBT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan objek wisata, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata dan terlibat dalam pengelolaannya.

Temuan di Ohoi Soinrat memperlihatkan bahwa potensi alam dan budaya telah menjadi dasar bagi pembentukan aktivitas wisata, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi keterbatasan kelembagaan, fasilitas, sumber daya manusia, dan legalitas beberapa objek wisata. Dengan demikian, potensi lokal belum secara otomatis menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal. Potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang mampu menghubungkan sumber daya lokal dengan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, serta dukungan pemerintah.

Kondisi tersebut memperkuat pandangan Timothy (1999) bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat membutuhkan pendekatan partisipatif dalam perencanaan. Masyarakat lokal perlu ditempatkan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pihak yang memiliki pengetahuan mengenai karakteristik wilayah, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Ohoi Soinrat, posisi masyarakat menjadi penting karena sebagian besar sumber daya wisata berada dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat.

2. Partisipasi Masyarakat sebagai Fondasi *Community-Based Tourism*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Ohoi Soinrat telah terlibat dalam kegiatan gotong royong, pemeliharaan kebersihan kawasan wisata, pembangunan fasilitas,

serta kegiatan Pokdarwis. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap destinasi wisata. Partisipasi masyarakat menjadi modal penting karena keberlanjutan desa wisata pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat lokal untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

Temuan tersebut sejalan dengan Okazaki (2008) yang menempatkan partisipasi masyarakat, proses kolaborasi, redistribusi kekuasaan, dan modal sosial sebagai unsur penting dalam model CBT. Dalam konteks Ohoi Soinrat, partisipasi tidak hanya terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan fisik, tetapi juga melalui keberadaan Pokdarwis dan keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdapat dasar sosial bagi pengembangan CBT.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat perlu dilihat secara lebih kritis. Keterlibatan dalam gotong royong dan pemeliharaan lingkungan merupakan bentuk partisipasi yang penting, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses pengambilan keputusan. Tosun (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di negara berkembang dapat menghadapi keterbatasan operasional, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, partisipasi perlu dikembangkan dari sekadar keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan menuju keterlibatan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan manfaat, dan evaluasi pembangunan wisata.

Dalam konteks tersebut, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pengembangan destinasi. Masyarakat tidak cukup hanya dilibatkan ketika program telah ditentukan oleh pemerintah, tetapi perlu dilibatkan sejak tahap identifikasi potensi, penyusunan program, penentuan prioritas pembangunan, pengelolaan kegiatan wisata, hingga evaluasi manfaat yang diperoleh masyarakat. Dengan pola tersebut, prinsip CBT dapat diterapkan secara lebih substantif.

3. Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Pokdarwis

Pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat menunjukkan adanya keterlibatan beberapa aktor, terutama pemerintah desa, masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah pusat melalui dukungan pembangunan infrastruktur. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak sepenuhnya dilakukan oleh satu aktor. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan pembangunan dan kelembagaan, sementara masyarakat dan Pokdarwis berperan dalam kegiatan pengelolaan serta pemeliharaan destinasi.

Kondisi tersebut dapat dianalisis melalui perspektif *Collaborative Governance*. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa collaborative governance menempatkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal, keseimbangan sumber daya, kepemimpinan, desain kelembagaan, dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, kolaborasi di Ohoi Soinrat telah terbentuk terutama melalui dukungan pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur dan kelembagaan serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Akan tetapi, pola kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena koordinasi antaraktor masih perlu

diperkuat. Artinya, kolaborasi yang berlangsung masih perlu dikembangkan dari hubungan kerja sama yang bersifat fungsional menuju proses kolaboratif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Aas et al. (2005) menunjukkan pentingnya komunikasi antarpemangku kepentingan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pembagian peran dalam pengelolaan pariwisata. Dalam konteks Ohoi Soinrat, temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat telah terbentuk, tetapi mekanisme koordinasi dan pembagian peran perlu diperjelas agar tidak terjadi ketergantungan yang terlalu besar pada pemerintah. Penguatan forum komunikasi antara pemerintah ohoi, Pokdarwis, tokoh masyarakat, dan masyarakat menjadi penting untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan, program, dan pembagian manfaat pariwisata.

Jamal dan Getz (1995) juga menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam perencanaan pariwisata berbasis komunitas. Kolaborasi memungkinkan berbagai kepentingan yang berbeda dipertemukan dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata di Ohoi Soinrat membutuhkan forum kolaboratif yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana koordinasi kegiatan, tetapi juga sebagai ruang untuk menyusun perencanaan, menyelesaikan permasalahan, dan menentukan prioritas pengembangan destinasi.

4. Kearifan Lokal sebagai Basis Penguatan *Community-Based Tourism*

Salah satu temuan penting penelitian adalah keberadaan nilai gotong royong dan tradisi adat masyarakat yang masih dipelihara. Nilai tersebut merupakan modal sosial yang dapat mendukung pengembangan desa wisata. Kearifan lokal menjadi penting karena memberikan identitas yang membedakan Ohoi Soinrat dari destinasi lainnya. Pengembangan wisata yang mengintegrasikan budaya lokal juga memungkinkan masyarakat menjadi aktor utama dalam menjaga identitas sosial dan budaya wilayahnya.

Dalam pendekatan CBT, budaya masyarakat bukan sekadar komoditas wisata, tetapi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga keberlanjutannya. Okazaki (2008) menekankan pentingnya modal sosial dan kolaborasi dalam membangun pariwisata berbasis masyarakat. Dengan demikian, nilai gotong royong yang ditemukan di Ohoi Soinrat dapat dipahami sebagai modal sosial yang memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama dalam mengelola destinasi.

Timothy (1999) juga menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam konteks pariwisata Indonesia karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan ruang dan budaya tempat mereka hidup. Oleh karena itu, pengembangan wisata Ohoi Soinrat sebaiknya tidak hanya menjadikan budaya lokal sebagai atraksi, tetapi juga memberikan ruang kepada masyarakat adat dan tokoh masyarakat untuk menentukan bentuk, batas, dan cara pemanfaatan budaya tersebut dalam kegiatan pariwisata.

Dengan demikian, kearifan lokal dapat ditempatkan sebagai salah satu fondasi tata kelola desa wisata. Nilai gotong royong dapat memperkuat partisipasi, nilai adat dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan sumber daya, sedangkan tradisi budaya dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan nilai dan makna yang dimilikinya.

5. Faktor Penghambat Pengembangan Desa Wisata

Meskipun memiliki potensi alam dan budaya yang besar, penelitian menemukan beberapa hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kondisi ekonomi masyarakat, minimnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya tata kelola karena beberapa objek wisata belum memperoleh legalitas administratif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan partisipasi masyarakat. Tosun (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibatasi oleh faktor struktural, operasional, dan kultural. Dalam konteks Ohoi Soinrat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitas dapat dipahami sebagai faktor yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola destinasi secara profesional.

Keterbatasan tersebut juga berhubungan dengan persoalan kelembagaan. Pokdarwis telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan wisata, tetapi penguatan kapasitas kelembagaan tetap diperlukan. Pokdarwis perlu memiliki kemampuan dalam perencanaan destinasi, pelayanan wisatawan, promosi, pengelolaan keuangan, pengembangan produk wisata, dan pemeliharaan lingkungan. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, keberadaan kelembagaan belum tentu mampu menghasilkan tata kelola wisata yang efektif.

Dalam perspektif collaborative governance, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya dukungan sumber daya dan kepemimpinan fasilitatif. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa ketidakseimbangan sumber daya dan kapasitas antaraktor dapat memengaruhi keberhasilan proses kolaborasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu berperan sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga sebagai fasilitator yang memperkuat kapasitas masyarakat dan mempertemukan berbagai aktor yang memiliki sumber daya berbeda.

6. Penguatan Tata Kelola sebagai Strategi Pengembangan Desa Wisata

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Potensi alam dan budaya yang besar belum dapat memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung oleh kelembagaan, koordinasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan legalitas yang memadai.

Lee (2013) menempatkan dukungan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata. Dukungan tersebut akan lebih mudah dipertahankan apabila masyarakat memperoleh manfaat dan melihat bahwa kegiatan pariwisata memberikan dampak positif terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, pengembangan Ohoi Soinrat perlu diarahkan pada penciptaan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat, misalnya melalui usaha kuliner, kerajinan, jasa pemandu, homestay, transportasi lokal, dan bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan potensi dan kapasitas masyarakat.

Goodwin dan Santilli (2009) juga menunjukkan bahwa keberhasilan CBT perlu dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat serta kemampuan komunitas mempertahankan keberlanjutan kegiatan wisata. Dengan demikian, keberhasilan Desa Wisata Ohoi Soinrat tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan atau jumlah fasilitas yang

dibangun, tetapi juga dari tingkat keterlibatan masyarakat, manfaat ekonomi lokal, keberlanjutan budaya, dan kemampuan masyarakat mempertahankan lingkungan destinasi.

7. Model *Collaborative Community-Based Tourism* Berbasis Kearifan Lokal di Ohoi Soinrat

Berdasarkan keseluruhan temuan, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat dapat dipahami melalui integrasi antara potensi lokal, partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan kearifan lokal. Model ini menunjukkan bahwa keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dalam membentuk tata kelola desa wisata.

Potensi alam dan budaya menjadi modal awal pengembangan destinasi. Potensi tersebut kemudian membutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat dikelola sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal. Partisipasi masyarakat selanjutnya perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah ohoi, Pokdarwis, masyarakat, pemerintah daerah, dan aktor pendukung lainnya. Kolaborasi tersebut diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, legalisasi objek wisata, serta pengembangan produk dan promosi wisata.

Kearifan lokal menjadi unsur yang mengikat keseluruhan proses tersebut. Nilai gotong royong dan tradisi adat masyarakat dapat menjadi modal sosial sekaligus pedoman dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya destinasi. Dengan demikian, model yang dikembangkan tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan wisata, tetapi sebagai aktor utama yang memiliki peran dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan destinasi.

Model tersebut sejalan dengan pemikiran Okazaki (2008) mengenai pentingnya partisipasi, kolaborasi, dan modal sosial dalam CBT, serta memperluasnya dengan menempatkan *collaborative governance* sebagai mekanisme tata kelola yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, perspektif Ansell dan Gash (2008) membantu menjelaskan bahwa kolaborasi membutuhkan proses dialog, kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kesepahaman bersama.

Dengan demikian, Model *Collaborative Community-Based Tourism* Ohoi Soinrat dapat dirumuskan sebagai suatu model tata kelola yang mengintegrasikan potensi lokal, partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, dan kearifan lokal untuk menghasilkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Model ini menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan pengarah, Pokdarwis sebagai penggerak operasional, masyarakat sebagai aktor utama dan pemilik modal sosial, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra dalam penyediaan sumber daya dan penguatan jaringan pariwisata.

Dengan model tersebut, pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat tidak diarahkan semata-mata untuk meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi untuk membangun tata kelola pariwisata yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan budaya serta lingkungan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan desa wisata pada dasarnya merupakan hasil dari hubungan yang sinergis antara kapasitas pemerintahan, kekuatan masyarakat, kelembagaan lokal, dan pemanfaatan kearifan lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat memiliki potensi yang kuat karena didukung oleh kekayaan wisata alam, budaya, serta modal sosial masyarakat. Pengembangan tersebut telah melibatkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, pemeliharaan lingkungan dan fasilitas wisata, serta keterlibatan dalam kelembagaan Pokdarwis. Partisipasi tersebut menjadi modal penting dalam penerapan pendekatan *Community-Based Tourism* karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki peran dalam pengelolaan dan keberlanjutan destinasi wisata.

Kolaborasi antara pemerintah ohoi, Pokdarwis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga telah menjadi bagian penting dalam pengembangan Desa Wisata Ohoi Soinrat. Pemerintah berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitasi, sedangkan masyarakat dan Pokdarwis berperan dalam pengelolaan serta pemeliharaan destinasi. Meskipun demikian, proses kolaborasi masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyelesaian legalitas objek wisata.

Penelitian ini merumuskan Model *Collaborative Community-Based Tourism* Berbasis Kearifan Lokal yang mengintegrasikan empat unsur utama, yaitu potensi lokal, partisipasi masyarakat, kolaborasi multipihak, dan kearifan lokal. Keempat unsur tersebut menjadi dasar dalam penguatan tata kelola desa wisata melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan Pokdarwis, dukungan pemerintah, pengembangan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi alam dan budaya secara berkelanjutan. Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah, Pokdarwis sebagai penggerak pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama yang memiliki peran dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan destinasi.

Dengan demikian, keberlanjutan Desa Wisata Ohoi Soinrat tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi wisata yang dimiliki, tetapi terutama oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam membangun kolaborasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mempertahankan kearifan lokal sebagai identitas destinasi. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi kerangka pengembangan tata kelola desa wisata yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang bagi penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan di Ohoi Soinrat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aas, C., Ladkin, A., & Fletcher, J. (2005). Stakeholder collaboration and heritage management. *Annals of Tourism Research*, 32(1), 28–48.
- [2] Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- [3] Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-Based Tourism: A Success? *ICRT Occasional Paper*, 11, 1–37.
- [4] Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalization* (4th ed.). Pearson Education.
- [5] Jamal, T., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. *Annals of Tourism Research*, 22(1), 186–204.

- [6] Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- [7] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.
- [8] Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. *Tourism Management*, 34, 37–46.
- [9] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [10] Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges of Tourism Village*. Gadjah Mada University Press.
- [11] Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- [12] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.
- [13] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [14] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- [15] Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- [16] Suansri, P. (2003). Community Based Tourism Handbook. *Responsible Ecological Social Tour (REST) Project Journal*, 1(1), 1–45.
- [17] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- [18] Timothy, D. J. (1999). Participatory planning: A view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391.
- [19] Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.